
Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Akreditasi Di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Kabupaten Pohuwato

Buhari Luneto¹, Ismiati Ahmad²

¹ Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, ² Mahasiswa Magister Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
e-mail: ¹buhariluneto@iaingorontalo.ac.id, ²ismiatiahmad78@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi manajemen berbasis madrasah dalam peningkatan akreditasi di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini adalah kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, pegawai tata usaha dan komite madrasah. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, Implementasi manajemen berbasis madrasah dalam peningkatan akreditasi di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia sudah terealisasi cukup baik dalam hal implementasi prinsip kemandirian, keadilan, kemitraan, keterbukaan, partisipasi, efisiensi dan prinsip akuntabilitas; dalam hal akreditasi madrasah yang berkenaan dengan 8 standar nasional pendidikan sebagai acuan minimal dalam melaksanakan akreditasi madrasah, Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia sudah terimplementasi dengan baik dan mendapatkan nilai akreditasi B. *Kedua*, faktor pendukung penerapan manajemen berbasis madrasah dalam peningkatan akreditasi di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia diantaranya: adanya kekompakan dari semua elemen di madrasah, semangat yang tinggi dalam membangun madrasah, adanya minat dan kerjasama yang tinggi serta adanya kesadaran personil dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Sementara yang menjadi faktor penghambat diantaranya: rendahnya minat orang tua dan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah, layanan ketatausahaan yang belum representatif, kebijakan pemerintah dan yayasan, adanya program pendidikan gratis, masih minimnya sarana prasarana, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang keunggulan madrasah. Rekomendasi hasil penelitian ini untuk yayasan, hendaknya madrasah diberi keleluasaan untuk mengelola secara mandiri proses pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, tidak lagi harus bergantung kepada kebijakan yayasan, kepala madrasah yang dipandang sebagai pihak yang banyak tahu tentang pengembangan mutu madrasah. Bagi Madrasah diharapkan mendorong proses pengembangan kemampuan personel madrasah dengan memanfaatkan prinsip kewenangan, pengetahuan, informasi dan penghargaan.

Kata kunci: Manajemen Berbasis Madrasah, Akreditasi Madrasah.

Pendahuluan

Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah telah banyak dilakukan, tetapi pendidikan masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan antara lain yang ialah rendahnya mutu pendidikan. Upaya yang telah dilakukan selama ini, melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, Indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian madrasah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan. Berdasarkan analisis dari beberapa pakar pendidikan, terdapat tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan Indonesia berada pada level rendah. *Pertama*, pendidikan terlalu berorientasi pada keluaran (*output*), dan kurang berorientasi

pada proses. *Kedua*, pendidikan terlalu bersifat birokratis-sentralistis. *Ketiga*, peran guru, keluarga, dan masyarakat masih kurang.

Berdasarkan berbagai kajian yang telah dilaksanakan, terdapat salah satu faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan, yaitu minimnya peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan madrasah, hal ini dilator belakang oleh kondisi sosiologis dan psikologis masyarakat yang kurang merasa memiliki, serta kurang bertanggung jawab untuk turut berpartisipasi aktif dalam membina kelangsungan madrasah. Seyogyanya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal, salah satu faktor penting yang ikut menentukan kualitas dan mutu madrasah ialah pelibatan masyarakat dalam aspek pengelolaan madrasah, melalui manajemen pemberdayaan masyarakat.¹

Strategi pengelolaan pendidikan yang mengedepankan kerjasama dari berbagai pihak, menjadi model pengelolaan madrasah yang dinamakan Manajemen Berbasis Madrasah.² Oleh karena itu, salah satu kebijakan dalam peningkatan manajemen madrasah adalah implementasi manajemen berbasis madrasah. Pendekatan ini sangat memerlukan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, baik yang terwadahkan dalam komite madrasah, dewan pendidikan maupun masyarakat secara umum.

Menyadari hal tersebut di atas, pemerintah tentu saja perlu melakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya ialah melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional yang telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah /Madrasah.

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah, agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah.

Keinginan agar pengelolaan pendidikan diarahkan pada arah desentralisasi dan otonomi ini menuntut partisipasi masyarakat secara aktif sebagai konsekuensi logis atas diberlakukannya otonomi daerah. Kebijakan politik di tingkat makro tersebut akan berdampak terhadap otonomi madrasah sebagai bagian dari system pendidikan nasional secara keseluruhan.³

Madrasah sebagai lini terdepan pada organisasi pendidikan akan menjadi pioner untuk menjalankan kebijakan tersebut, karena madrasah memiliki akar sejarah yang sangat dalam, dimana ide pendiriannya muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan diperuntukkan juga bagi masyarakat itu sendiri. Kebijakan yang tertuang dalam konsep Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) ini, harus dimaknai sebagai bentuk otonomi sistem dalam pengelolaan pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan sekedar memindahkan tanggung jawab, dari pemerintah ke tangan masyarakat.⁴

¹Sunanto, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Jurnal: Intelektualita - Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2015), h. 51.

²E. Mulyasa., *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 122.

³E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 4.

⁴Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011), h. 30.

Manajemen Berbasis Madrasah memberi keleluasaan kepada madrasah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara mandiri, yang diharapkan dapat mengangkat mutu dan kualitas pendidikan yang dijalankan oleh sekolah/madrasah, serta diharapkan dapat memecahkan berbagai persoalan pendidikan pada tataran aplikatif di lapangan (praktik nyata). Manajemen Berbasis Madrasah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang berkelanjutan, baik secara makro, maupun mikro. Kerangka makro erat kaitannya dengan upaya politik yang saat ini sedang ramai dibicarakan yaitu desentralisasi kewenangan dari pusat ke daerah, sedangkan aspek mikro melibatkan seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang paling bawah, tetapi terdepan dalam pelaksanaannya, yaitu madrasah.⁵ Pola manajemen seperti ini dipandang dapat member peluang bagi kepala madrasah, guru dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di madrasah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran dan manajerial, yang berangkat dari aktivitas, kreativitas dan profesionalisme yang dimiliki.

Manajemen Berbasis Madrasah merupakan konsep pengelolaan madrasah yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era desentralisasi pendidikan. Sebagaimana dikemukakan juga oleh Irianto, bahwa implementasi Manajemen Berbasis Madrasah memberikan kesempatan yang luas bagi *stakeholders* untuk turut serta atau berpartisipasi aktif dalam menentukan arah madrasah.⁶ Pendapat ini mengindikasikan bahwa kebijakan untuk melibatkan kelompok kepentingan dalam penyelenggaraan madrasah, merupakan upaya positif dalam memberdayakan madrasah.

Hal senada juga disampaikan oleh Rohiat bahwa Manajemen Berbasis Madrasah merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada madrasah), memberikan keluwesan kepada madrasah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga madrasah (guru, siswa, kepala madrasah, staf) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha), dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Manajemen Berbasis Madrasah memberikan otonomi yang lebih luas kepada madrasah, dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan madrasah serta masyarakat atau *stakeholder* yang ada untuk meningkatkan mutu madrasah. Menurut Kustini Hardi, penerapan Manajemen Berbasis Madrasah mempunyai tiga tujuan, yaitu: *Pertama*, mengembangkan kemampuan kepala madrasah bersama guru dan unsur komite madrasah dalam aspek Manajemen Berbasis Madrasah untuk meningkatkan mutu sekolah. *Kedua*, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat setempat. *Ketiga*, mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah, untuk membantu peningkatan mutu pendidikan.⁸

⁵Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan.*, h.11.

⁶Irianto, Yoyon Bahtiar, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 159.

⁷Rohiat. *Manajemen Sekolah Teori Dasar Dan Praktik.* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 47.

⁸Umiarso dan Gojali Imam. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan.* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2010), h.80.

Keberhasilan penerapan manajemen berbasis madrasah tersebut sangat tergantung pada kemampuan kepala madrasah untuk dapat berperan secara aktif dalam pengelolaan madrasah dengan memberdayakan semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan madrasah, khususnya dalam memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 menyatakan bahwa: pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan pada standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.⁹

Peningkatan mutu pendidikan ditingkatkan madrasah/sekolah, mensyaratkan kemampuan personal kepala madrasah yang proaktif dalam menyikapi tantangan dan hambatan, serta fakta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh madrasah/sekolah itu sendiri. Sehingga dengan adanya otonomi pendidikan, kepala madrasah/sekolah dituntut untuk mampu mengubah keadaan madrasah yang kurang efektif dan kondusif, menuju madrasah/sekolah yang unggul dan maju. Salah satu kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yakni dengan dilakukannya akreditasi sekolah/madrasah. Berkaitan dengan hal ini Allah swt., berfirman dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak adapelindung bagi mereka selain Dia.¹⁰

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia yakni dapat diukur dari proses akreditasi madrasah. Dengan dilakukan penilaian terhadap akreditasi madrasah, maka madrasah tersebut dapat menunjukkan keberhasilannya. Kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong, dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan, dan sekaligus diharapkan dapat memberikan arahan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan.

Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia adalah salah satu Madrasah Aliyah di Kabupaten Pohuwato yang berlokasi di Jalan Trans Sulawesi Desa Buntulia, Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, sudah menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah sebagai perwujudan otonomi pemerintah dalam pendidikan. Namun dalam implemenasinya, dipandang belum berjalan secara optimal karena beberapa masalah antara lain meliputi: *Pertama*, konsep Manajemen Berbasis Madrasah belum sepenuhnya dipahami oleh para pemangku kepentingan. *Kedua*, masih terdapat kebiasaan madrasah yang sangat tergantung pada birokrasi di atasnya, sehingga menghambat kemandirian madrasah. *Ketiga*, banyak orang tua dan masyarakat yang tidak mau terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah.¹¹

⁹Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁰Depag RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1996), h. 19.

¹¹Hasil Pengamatan, *Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato*. Observasi awal: Selasa, 23 Oktober 2018

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini perlu dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji dan meneliti permasalahan di atas, yang diformulasikan dalam judul penelitian “Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah dalam Peningkatan Akreditasi di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Kabupaten Pohuwato”.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkaji permasalahan penerapan manajemen berbasis madrasah, dalam meningkatkan akreditasi di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Kabupaten Pohuwato. Penggunaan jenis penelitian kualitatif ini dimaksudkan agar, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penjelasan pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dengan hasil penelitian (kualitatif) lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.¹²

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang memiliki pengertian terbatas pada usaha mengungkapkan masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta, dan proses mencari informasi tentang keadaan-keadaan secara nyata dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan penelitian ini dipilih dan ditetapkan karena dalam pendekatan penelitian kualitatif, gejala-gejala, informasi-informasi, atau keterangan-keterangan dari hasil pengamatan selama proses penelitian mengenai penerapan manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Kabupaten Pohuwato.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari hasil wawancara dan observasi, dan sumber data sekunder terdiri dari studi dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Adapun dalam proses analisis data, menggunakan teori Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*), menarik kesimpulan/verifikasi (*conclusion/verification*). Sementara proses Pengujian keabsahan data dilakukan dengan ketekunan pengamatan, memperpanjang kehadiran peneliti, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat.

Hasil Penelitian

Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah dalam Meningkatkan Akreditasi Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Kabupaten Pohuwato

Sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan observasi dan wawancara terhadap beberapa informan diantaranya: kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, pegawai tata usaha dan komite madrasah. Bahwa implementasi manajemen berbasis madrasah, dalam peningkatan akreditasi Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Kabupaten Pohuwato, yang menjadi perencana, pengorganisir, koordinator dan pembuat keputusan adalah kepala madrasah, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan juga sebagai pemegang kendali madrasah/sekolah,

¹²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*(Bandung, Alfabeta, Cet. 11. 2011), hal. 15.

dengan dibantu oleh para Wakil Kepala Madrasah. Adapun hasil wawancara peneliti dengan masing-masing informan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut.

Dari hasil wawancara bersama kepala madrasah, diketahui bahwa: Manajemen Berbasis Madrasah adalah pemberian kewenangan, atau kebebasan secara langsung yang diberikan kepada pihak madrasah, untuk mengatur segala kebutuhan yang berkenaan dengan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas madrasah dalam mencapai tujuan bersama.¹³

Wawancara dengan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan menjelaskan bahwa: Manajemen Berbasis Madrasah adalah suatu konsep yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengembangkan sekolah, sesuai dengan kebutuhannya dalam mengelola pendidikan. Sehingga kepala sekolah/madrasah beserta semua dewan guru dituntut untuk memiliki kompetensi dan keterampilan, agar dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang diperlukan, dalam peningkatan akreditasi madrasah.¹⁴

Sedangkan hasil dari wawancara dengan wakil kepala madrasah bidang kurikulum, beliau menyatakan bahwa: Manajemen Berbasis Madrasah merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjalankan segala kebijakan sesuai dengan keadaan sekolah, untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan untuk melaksanakan program-program yang diterapkan, dalam mencapai tujuan harus dilakukan kerjasama dari berbagai pihak.¹⁵

Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah dapat peneliti simpulkan bahwa beliau sudah memahami arti penting dari manajemen berbasis madrasah dalam peningkatan akreditasi madrasah, yakni pemberian kewenangan atau kebebasan secara langsung yang diberikan kepada pihak madrasah untuk mengatur segala kebutuhan yang berkenaan dengan pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Dan untuk melaksanakan segala kegiatan yang dalam hal ini adalah Manajemen Berbasis Madrasah tidaklah dilakukan sendiri, akan tetapi dikerjakan dengan bantuan semua warga madrasah, sehingga segala kegiatan dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang disepakati bersama. Dengan kata lain, musyawarah adalah hal yang terpenting dalam memutuskan prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Pernyataan tersebut diperkuat pula oleh keterangan wakil kepala madrasah bidang kurikulum dan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, bahwa Manajemen Berbasis Madrasah memberikan kewenangan penuh kepada Madrasah untuk mengembangkan sekolah, sesuai dengan kebutuhannya dan/atau keadaan sekolah dalam mengelola pendidikan.

Manajemen berbasis madrasah sangat erat kaitannya dengan akreditasi akreditasi madrasah, dimana suatu proses penilaian kualitas madrasah baik madrasah negeri maupun swasta, dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Adapun hasil penilaian tersebut akan dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan.

Akreditasi Madrasah juga dapat diartikan sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan atau program pendidikan, yang

¹³Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 24 Juni 2019.

¹⁴Fathan Lasiki. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Bidang Kesiswaan, *Wawancara*, Buntulia: Rabu, 10 Juli 2019.

¹⁵Irawati As. Ali. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Bidang Kurikulum, *Wawancara*, Buntulia: Selasa, 2 Juli 2019.

dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi merupakan alat regulasi diri (*self-regulation*) agar sekolah/madrasah mengenal kekuatan dan kelemahan, serta melakukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan serta memperbaiki kelemahannya. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan, pada jalur pendidikan formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Tujuan akreditasi madrasah adalah untuk memperoleh gambaran keadaan dan kinerja madrasah, serta untuk menentukan tingkat kelayakan suatu madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Dengan adanya akreditasi masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah yang akan dipilihnya, sehingga terhindar dari adanya praktik yang tidak bertanggung jawab.

Hal terpenting pada Manajemen Berbasis Madrasah dalam meningkatkan akreditasi di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, adalah dalam hal penerapannya mencakup kemandirian, keadilan, kemitraan, keterbukaan, partisipasi, efisiensi dan prinsip akuntabilitas. Beberapa hal tersebut akan dijelaskan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut:

a. Prinsip Kemandirian

Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Kabupaten Pohuwato sebagai madrasah swasta, dipandang sudah terbiasa dengan iklim kemandirian, baik kemandirian dalam mengambil keputusan, kemandirian dalam pengelolaan, pendanaan serta kemandirian dalam bekerja. Oleh karena itu, walaupun terjadi perubahan kebijakan yang signifikan terhadap politik pendidikan, dengan bergesernya pengelolaan pendidikan dari yang semula sentralistis, menuju pengelolaan yang bersifat desentralistis. Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia telah terbiasa dengan model pengelolaan yang bersifat mandiri.

Penerapan prinsip kemandirian di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, dapat dilihat dari kemandiannya dalam mengelola keuangan dan pembiayaan, meskipun keuangan dan pembiayaan bukan menjadi faktor utama dalam suatu organisasi pendidikan dalam mempertahankan keberadaannya, tetapi keterbatasan keuangan akan menjadi faktor penghambat bagi operasional organisasi pendidikan dalam mengembangkan dirinya. Selain itu juga pengelolaan keuangan dan pembiayaan yang baik, akan memudahkan organisasi untuk menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia berusaha mengelola keuangan dan pembiayaannya dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa petikan hasil wawancara, yang dilakukan dengan kepala madrasah terkait kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan bidang keuangan dan pembiayaan, dalam hal menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), mengidentifikasi sumber dana/menggali dana eksternal maupun internal, merealisasikan dana sesuai dengan rencana, pertanggung jawaban keuangan dan evaluasi anggaran.

Kaitannya dengan kemandirian menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), kepala madrasah mengungkapkan bahwa membahas tentang penyusunan RKAS yang menyangkut proses penganggaran biaya pendidikan di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, proses pertama diawali dengan melakukan rapat kerja tahunan bersama anggota rapat, kemudian anggota rapat membuat draft anggaran. Dari draft tersebut, kemudian dibuat proposal yang nantinya akan diajukan ke Yayasan Alkhairaat untuk disahkan atau disetujui. Alurnya dirapatkan dulu dan kemudian

diajukan ke yayasan, setelah disetujui pihak yayasan kemudian dimasukkan ke dalam RKAS dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak yayasan.¹⁶

Kaitannya dengan kemandirian mengidentifikasi sumber dana/menggali dana eksternal maupun internal, kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia seperti yang diketahui sumber dana madrasah swasta, berasal dari yang pertama tentu saja dari uang SPP setiap bulan, yang dibebankan kepada setiap peserta didik, kemudian dari dana bantuan seperti dana BOS dan PRODIRA, kemudian ada dana bantuan dari luar juga (hibah). Alokasi dananya untuk membiayai program-program madrasah atau kegiatan madrasah, dan penyelenggaraan pendidikan sebagai sarana demi terjaminnya keberlangsungan kegiatan madrasah, namun dengan adanya kebijakan program pendidikan gratis dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato, maka untuk pembayaran iuran SPP dari setiap peserta didik dihapuskan, sehingga sumber pendanaan dari madrasah berkurang, tidak sebanding dengan operasional yang dikeluarkan. Hal ini yang membuat madrasah, belum mampu menghasilkan proses pembelajaran yang sesuai atau harapan yang baik untuk peserta didik karena terkendala dalam hal pendanaan, akan pihak madrasah tetap berusaha semaksimal mungkin, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran yang sesuai kondisi anggaran yang ada.¹⁷

Kaitannya dengan kemandirian pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi anggaran, kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia mengatakan bahwa sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan yang ada, pihaknya selalu meminta kepada bendahara madrasah untuk membuat pembukuan bulanan sebagai bahan acuan untuk laporan keuangan di akhir semester. Kemudian setiap transaksi keuangan apapun selalu disertai dengan bukti yang sah ketika mereka menggunakan dana madrasah untuk keperluan mereka di madrasah.¹⁸ Dalam konteks akreditasi madrasah, dapat diberikan pengertian bahwa prinsip kemandirian dalam manajemen berbasis madrasah, sebagai suatu proses penilaian kinerja madrasah. Dengan prinsip kemandirian yang diterapkan oleh madrasah aliyah selanjutnya, dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggara dan pelayanan pendidikan di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kemandirian pada manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan akreditasi madrasah di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia sudah cukup baik dalam mengelola keuangan dan pembiayaannya, mulai dari menyusun rencana kegiatan dan anggaran madrasah (RKAM), mengidentifikasi sumber dana/menggali dana eksternal maupun internal, merealisasikan dana sesuai dengan rencana, serta pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi anggaran.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi. Prinsip keadilan juga dilakukan dengan memberikan akses yang

¹⁶Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 24 Juni 2019

¹⁷Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 24 Juni 2019

¹⁸Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 24 Juni 2019

sama kepada semua unsur ketenagaan, agar meningkatkan kemampuannya dalam rangka mengembangkan karirnya.

Terkait dengan pemberian akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, kepala madrasah menyatakan bahwa dalam penerimaan peserta didik baru dilakukan setiap tahun ajaran baru selalu mengikuti pedoman PPDB yang pelaksanaannya secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, sehingga masyarakat terutama orang tua yang mendaftarkan anaknya ke Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia dapat terlayani dengan baik. Hal yang terpenting adalah peserta didik yang diterima memperhatikan perbandingan antara ruang belajar, dengan jumlah peserta didik dalam kelas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi kegiatan pembelajaran.¹⁹

Selanjutnya terkait dengan pemberian akses yang sama kepada semua unsur ketenagaan, agar meningkatkan kemampuannya dalam rangka mengembangkan karirnya, kepala madrasah mengungkapkan bahwa usaha dalam hal pembinaan pengembangan karir bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang ada, lebih didasarkan kepada prestasi kerja. Siapa saja yang memiliki prestasi yang lebih baik, maka dialah yang berhak mendapatkan kesempatan terlebih dahulu atau diberikan penghargaan.²⁰

Sementara pemberian akses yang sama kepada semua unsur ketenagaan agar meningkatkan kemampuannya, kepala madrasah mengatakan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada semua individu, baik pendidik maupun tenaga kependidikan untuk berkembang dan maju, yang diantaranya melalui studi lanjut melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Termasuk untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan dan tuntutan zaman. Di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, terutama tenaga pendidik hampir secara keseluruhan telah berpendidikan S1, bahkan telah ada yang berhasil menempuh studi S2. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia para pendidik dan tenaga kependidikan, dengan harapan mampu membawa peningkatan akreditasi di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia.²¹

Berdasarkan temuan penelitian diatas, menunjukkan implemementasi prinsip keadilan pada manajemen berbasis madrasah, dalam peningkatan akreditasi di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, dalam hal pencapaian tujuan pendidikan di madrasah, sudah terealisasi dengan cukup baik, dalam pemberian akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, atau calon peserta didik serta pemberian akses yang sama kepada semua unsur ketenagaan, agar meningkatkan kemampuannya dalam rangka mengembangkan karirnya.

c. Prinsip Kemitraan

Penerapan prinsip kemitraan kerjasama penting untuk dilakukan, karena disadari sepenuhnya bahwa hasil pendidikan merupakan hasil kolektif dari unsur-unsur terkait, atau para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kemitraan yang dapat menghasilkan *teamwork* yang kompak, cerdas, dan dinamis, akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan sekolah, termasuk di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia. Indikator

¹⁹Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 24 Juni 2019

²⁰Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 24 Juni 2019

²¹Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 24 Juni 2019

keberhasilan penerapan prinsip kemitraan dapat dilihat dari eksistensi komite madrasah, membangun kemitraan yang menandakan suatu keberadaan yang mewakili suatu wadah peran serta masyarakat, yakni organisasi masyarakat yang harus memiliki suatu komitmen dan loyalitas, serta kepercayaan terhadap peningkatan kualitas madrasah.

Berkaitan dengan kemitraan di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, Ketua komite mengungkapkan bahwa: setiap aspirasi orang tua/wali peserta didik yang muncul, baik melalui saran maupun secara langsung disampaikan dalam rapat, tetap kita tampung dan dibawa ke dalam rapat pengurus. Jadi setiap keluhan orang tua/wali peserta didik tetap kita sampaikan kepada pihak madrasah, sehingga kepala madrasah juga mengetahui apa yang diinginkan orang tua/wali peserta didik, untuk kemajuan madrasah. Hasil keputusan yang dihasilkan oleh pihak madrasah, selanjutnya disampaikan kepada orang tua/wali peserta didik, melalui surat yang disampaikan kepada peserta didik.²²

Terkait dengan pernyataan di atas, Kepala Madrasah Aliyah mengatakan bahwa dalam hal membangun kemitraan, program madrasah merupakan program yang dihasilkan melalui kerja sama antara pihak madrasah dengan komite madrasah, sehingga program-program komite madrasah merupakan bagian dari madrasah itu sendiri. Adapun program-program tersebut antara lain: pembangunan fisik, penyediaan dana, pengadaan sarana dan prasarana, serta pelayanan terhadap peserta didik dan masyarakat yang berkaitan erat dengan pengembangan, serta peningkatan mutu madrasah.

Kaitannya dengan pernyataan di atas, wakil kepala madrasah bidang kurikulum sekaligus merangkap bidang humas mengemukakan bahwa, dalam rangka untuk meningkatkan kemitraan, pihak komite telah melibatkan diri dalam bentuk membantu pihak madrasah untuk melengkapi perlengkapan sarana dan media pembelajaran. Hal tersebut sebagai pendukung pelaksanaan pembelajaran, dalam upaya memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini komite berupaya menjembatani pihak madrasah dengan masyarakat dan swasta, dalam bentuk merehab kelas sebagai ruang belajar. Komite juga telah membeli 2 buah komputer dan 1 buah laptop, untuk mendukung kinerja guru dan kepala madrasah. Semua pengadaan dana dan perbaikan sarana prasara ini, diperoleh dengan jalan swadaya masyarakat dan kerjasama madrasah dengan masyarakat melalui musyawarah. Komite juga melakukan evaluasi terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan madrasah, termasuk penilaian terhadap kualitas kebijakan dari pengelola yayasan, dan mengontrol pelaksanaan program di madrasah.²³

Berdasarkan kegiatan kemitraan yang dilakukan di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia di atas, menunjukkan kemitraan yang dilakukan di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia dalam hal pencapaian tujuan pendidikan di madrasah, sudah terealisasi dengan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya upaya bersama dalam membangun madrasah, agar mampu bersaing dengan madrasah Aliyah Negeri dan sekolah umum lainnya.

²²Hamid Buheli. Komite Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 8 Juli 2019.

²³Irawati As. Ali. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Bidang Kurikulum, *Wawancara*, Buntulia: Selasa, 2 Juli 2019.

d. Prinsip Keterbukaan

Manajemen madrasah yang menitik beratkan pada aspek kemandirian madrasah dengan ciri utama pada adanya keterbukaan atau transparansi, pelaksanaannya dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan diselenggarakan dengan terbuka. Misalnya manajemen keuangan dikelola secara transparan dan terbuka. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam penerapan manajemen berbasis madrasah, yang menuntut kemampuan madrasah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Hasil wawancara bersama kepala madrasah terkait dengan keterbukaan dalam pengelolaan sekolah, beliau mengatakan bahwa: di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia telah menerapkan manajemen yang terbuka, dalam hal pengambilan keputusan kami selalu berusaha agar dalam segala keputusan yang dihasilkan tersebut, merupakan hasil musyawarah terdahulu, agar asas keterbukaan dan demokrasi bisa terlaksana dengan baik, dalam hal pelaksanaan dan kegiatan, terutama masalah keuangan. Biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun adalah seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran.²⁴

Hal tersebut seperti yang dituturkan Wakil Kepala Madrasah Bidang kurikulum sekaligus merangkap bidang humas bahwa tujuan dari penerapan transparansi dalam pengelolaan madrasah terutama pengelolaan keuangan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. Selain itu dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan juga dapat menambah wawasan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah.²⁵

Berdasarkan penelusuran dokumen diperoleh gambaran bahwa realisasi anggaran madrasah, merupakan pelaksanaan anggaran madrasah yang telah direncanakan dalam rencana kegiatan anggaran madrasah (RKAM) dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Madrasah dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, telah membukukan setiap penggunaan atau realisasi dari anggaran yang telah disusun, yang nantinya akan dipublikasikan. Penerapan transparansi selalu dilakukan dengan adanya publikasi dari pelaksanaan anggaran yang dilakukan pihak madrasah, melalui rapat rutin madrasah dan publikasi melalui media papan pengumuman (*mading*) madrasah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, dalam hal transparansi manajemen terbagi dalam beberapa hal, yakni dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan kegiatan madrasah, dan transparansi pendanaan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan bagian yang tak terpisahkan dalam manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola dengan baik, agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk

²⁴Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 24 Juni 2019.

²⁵Irawati As. Ali. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Bidang Kurikulum, *Wawancara*, Buntulia: Selasa, 2 Juli 2019.

tercapainya tujuan pendidikan. Adapun biaya yang dikeluarkan tiap tahunnya dalam penyelenggaraan pendidikan, terdiri atas; gaji pegawai (guru dan non guru), biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa dalam hal penerapan prinsip transparansi manajemen berbasis madrasah, di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia telah menerapkan manajemen yang terbuka.

e. Prinsip Partisipasi

Hubungan madrasah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan peserta didik di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, dukungan yang besar dari masyarakat ini sebenarnya merupakan refleksi dari diciptakannya iklim keterbukaan oleh madrasah, terutama jalinan kerjasama antara madrasah dan masyarakat, karena madrasah sendiri menyadari tanpa bantuan masyarakat madrasah atau lembaga tidak akan bisa berkembang dan tidak akan mencapai kesuksesan, madrasah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan madrasah atau pendidikan secara efektif dan efisien, disinilah masyarakat mempunyai rasa kepemilikan terhadap madrasah ini untuk bersama-sama membangun dan turut mencerdaskan anak bangsa.

Menurut wakil kepala madrasah bidang kesiswaan menyatakan bahwa: Dalam manajemen ini, masyarakat dengan madrasah mempunyai hubungan yang sangat penting karena antara madrasah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Madrasah adalah bagian integral dari masyarakat, bukan suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat, karena masyarakat merupakan faktor pendukung terhadap peningkatan Manajemen Berbasis Madrasah, peran serta masyarakat dalam pendidikan tidak akan muncul begitu saja tanpa adanya upaya-upaya untuk menggalangnya, upaya untuk menggalang dan mendorong peran serta masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat bergerak dalam meningkatkan mutu pendidikan.²⁶

Deskripsi pendapat di atas, memberi gambaran bahwa dalam penerapan prinsip partisipasi di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia dilakukan dengan cara: *Pertama*, dalam membangun kerjasama dengan masyarakat adalah yang pertama mengundang orang tua peserta didik, komite madrasah, dan tokoh masyarakat dalam sebuah diskusi tentang cara meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. *Kedua*, menjelaskan kepada masyarakat bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada pemerintah, melainkan juga masyarakat. *Ketiga*, kepala madrasah dan guru memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk turut mengelola keuangan madrasah, terutama yang bersumber dari masyarakat. Jadi hubungan madrasah dengan masyarakat sangat erat karena kedekatan dengan pesantren atau yang menaungi madrasah ini juga sehingga masyarakat dan madrasah dalam segala kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah sangat mendukung.

Berdasarkan penelusuran dokumen terkait bentuk partisipasi masyarakat diperoleh informasi bahwa wujud partisipasi masyarakat di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, sangat banyak seperti dalam kegiatan madrasah Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) ataupun mengadakan bazar, madrasah dan masyarakat saling bahu membahu dalam mensukseskan acara madrasah tersebut, dalam hal pendanaan maupun teknis di lapangan. Kesimpulan yang peneliti dapatkan dari wawancara dan penelusuran dokumen di atas ialah bahwa hubungan dengan masyarakat tidak akan muncul begitu saja, tanpa adanya upaya untuk menggalang dan mendorong peran masyarakat, karena

²⁶Fathan Lasiki. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Bidang Kesiswaan, *Wawancara*, Buntulia: Rabu, 10 Juli 2019

opini yang dimiliki masyarakat saat ini, adalah bahwa madrasah merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam konsep Manajemen Berbasis Madrasah hubungan madrasah dengan masyarakat bertujuan antara lain: a) untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik, b) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, c) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan madrasah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, yang harus dilakukan adalah *pertama* dalam membangun kerjasama dengan masyarakat adalah yang pertama mengundang orang tua murid, komite madrasah, dan tokoh masyarakat dalam sebuah diskusi tentang cara meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. *Kedua*, menjelaskan kepada masyarakat bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada pemerintah, melainkan juga masyarakat. *Ketiga*, kepala madrasah dan guru memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk turut mengelola keuangan madrasah, terutama yang bersumber dari masyarakat.

Di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia saat ini sudah mempunyai hubungan yang baik terhadap masyarakat, sehingga mampu menunjang proses atau suksesnya manajemen berbasis madrasah. Dengan wujud partisipasi masyarakat di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntuliyang salah satunya dalam kegiatan madrasah PHBI ataupun mengadakan bazar, madrasah dan masyarakat saling bahu membahu dalam mensukseskan acara madrasah tersebut dalam hal pendanaan maupun teknis lapangan, menunjukkan bahwa penerapan prinsip partisipasi manajemen berbasis madrasah di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia sudah cukup baik, dalam membangun kerjasama dengan masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada pemerintah, melainkan juga masyarakat, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

Implementasi manajemen berbasis madrasah dalam peningkatan akreditasi Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, dengan prinsip partisipasi masyarakat sangat menunjang eksistensi madrasah, hal ini dapat dilihat dari besarnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia. Kerjasama dengan orang tua peserta didik umumnya didefinisikan sebagai usaha para orang tua peserta didik, untuk mendukung kegiatan pembelajaran di madrasah dengan cara membantu belajar anak di rumah, mengawasi kegiatan anak di luar madrasah, berkomunikasi dengan anak tentang apa yang dipelajari di madrasah, menghadiri kegiatan-kegiatan madrasah yang sesuai, serta berkomunikasi dengan guru/staf madrasah.

f. Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia. Indikator prinsip efisiensi manajemen berbasis madrasah terlaksana dengan baik dapat dilihat dari beberapa aspek, *pertama* dalam hal pemberian otonomi luas kepada madrasah berjalan dengan baik, ini dapat dilihat masing-masing pada bidang pengelolaan (pengelolaan kesiswaan, pengelolaan kurikulum, pengelolaan sarana dan prasarana dan pengelolaan hubungan masyarakat), masing-masing bidang mampu mengembangkan kegiatan secara otonom penuh, sesuai dengan program madrasah.

Kaitan dengan pengelolaan bidang Kesiswaan kepala madrasah mengatakan, bahwa pengelolaan bidang Kesiswaan di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia yaitu sejak mulai masuk menjadi peserta didik sampai keluar dari Madrasah Aliyah, dengan sistem pengelolaan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

bersifat praktis dan operasional, meskipun berstatus sebagai sekolah swasta harus mengikuti peraturan dan regulasi yang ada, mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik baru, pembinaan selama peserta didik berada di madrasah, sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya. Pembinaan peserta didik dilakukan agar peserta didik mengenal lingkungan tempat belajar mereka, dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan madrasah.²⁷

Pendapat di atas, diperkuat oleh wakil kepala madrasah bidang kesiswaan yang menyatakan, bahwa indikator keberhasilan pengelolaan di bidang Kesiswaan di madrasah ini dapat dilihat dari persentase kelulusan setiap tahun, yang selalu mencapai seratus persen lulus, dan tentunya madrasah mendapatkan pengakuan akreditasi “B” didukung dengan adanya berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung akademik peserta didik, kekompakan serta kerjasama antara kepala madrasah, guru dan tata usaha sehingga berbagai macam tindak pelanggaran sampai saat ini, belum terdapat pelanggaran berat yang dilakukan oleh peserta didik maupun sampai pada hukuman yang berat. Pelanggaran yang dilakukan peserta didik masih dalam penanganan guru dan kepala madrasah, dengan memberi nasehat sekaligus peringatan agar peserta didik tidak mengulangi perbuatannya.²⁸

Kaitan dengan pengelolaan bidang kurikulum Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia mengatakan keistimewaan Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia dalam proses pembelajarannya, banyak menitikberatkan pada pemahaman keagamaan. Proses pembelajaran Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia ini merupakan hasil adopsi dari keinginan pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, namun demikian tidak meninggalkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara nasional. Selaku wakil kepala madrasah bidang kurikulum untuk mengevaluasi kurikulum dilakukan dengan mengadakan rapat dengan mengundang para tim pengembangan kurikulum untuk membicarakan temuan-temuan tersebut, apakah kurikulum perlu direvisi atau tidak. Hal ini dilakukan agar kurikulum di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia selalu melakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada prospek yang lebih baik, serta selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan perkembangan zaman.²⁹

Salah seorang guru di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia mengungkapkan bahwa secara historis, proses pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia bermula dari usulan dan dukungan para orang tua peserta didik, beserta tokoh masyarakat/komite madrasah sebagai pemangku kepentingan, dengan tetap memperhatikan visi madrasah yaitu “Menjadi Madrasah yang unggul, santun dan Islami. Semua jenjang pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Alkhairaat ini, berpijak dan mengacu pada program yayasan. Baik hal itu berupa program kurikulum pendidikan umum, maupun program kurikulum PAI. Oleh karena itu rumusan pendidikan yang disusun/diformat termasuk dalam hal rumusan tujuan pendidikan, dari masing-masing unit harus berpijak pada tujuan yayasan. Sedangkan yayasan mengacu dan berpijak pada tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks inilah kurikulum 2013 dipandang tepat untuk diterapkan, karena karakter dasar dari kurikulum

²⁷Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 24 Juni 2019

²⁸Fathan Lasiki. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Bidang Kesiswaan, *Wawancara*, Buntulia: Rabu, 10 Juli 2019

²⁹Irawati As. Ali. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Bidang Kurikulum, *Wawancara*, Buntulia: Selasa, 2 Juli 2019

2013 membekali kecakapan dan keterampilan riil, yang akan ditemui dan dibutuhkan oleh peserta didik di masyarakat nanti, jadi madrasah tidak hanya menyampaikan materi yang bersifat teoritis, namun guru juga perlu mengejar target untuk menyelesaikan materi pelajaran, tetapi madrasah dan guru harus mengutamakan kecakapan peserta didik untuk memahami dan melakukan sesuatu secara riil dan fungsional.³⁰

Kaitannya dengan pengelolaan bidang sarana dan prasarana, kepala madrasah mengatakan bahwa kegiatan ini dimulai dari pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang ada, dengan melibatkan semua warga madrasah dibawah pengarahannya wakil kepala madrasah bidang sarana prasarana, agar menumbuhkan kepedulian terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki, strategi ini dijalankan dengan memberikan imbauan kepada semua warga madrasah.³¹

Kaitannya dengan pengelolaan bidang humas, kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia mengungkapkan bahwa program humas yang dilaksanakan di madrasah ialah diantaranya pertemuan wali murid, *home visit*, kunjungan ke sekolah lain, karyawisata, pentas kesenian, buka bersama pada bulan *ramadhan* dan sebagainya. Program kehumasan yang dilaksanakan di madrasah ini, ditujukan untuk mendukung perkembangan peserta didik. Apalagi dengan adanya partisipasi para orangtua peserta didik yang begitu besar dan sangat antusias, pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh madrasah ini.³²

Pendapat di atas, dipertegas oleh wakil kepala madrasah bidang humas yang mengatakan bahwa Pengelolaan bidang humas dan kemitraan difokuskan pada kerjasama dalam rangka penjaminan mutu pendidikan madrasah, melalui kerjasama dengan bimbingan belajar, aspek lingkungan, aspek pembinaan karakter, aspek pengelolaan sarana dan prasarana melalui kerjasama dengan rekanan, maupun instansi yang memberikan layanan pengadaan jasa serta melibatkan masyarakat pada beberapa kegiatan madrasah.

Berdasarkan hasil pencermatan dokumen, pelaksanaan pengelolaan bidang humas terdiri dari kegiatan yang melibatkan komite madrasah, masyarakat, dan kemitraan yang ada. Akan tetapi dokumen terkait bidang humas tersebut, tidak secara jelas disebutkan sehingga pemahaman terhadap rencana bidang humas belum secara maksimal dipahami. Selanjutnya indikator prinsip efisiensi manajemen berbasis madrasah yang *Kedua* adalah dalam hal partisipasi masyarakat dan orang tua di madrasah ini juga berjalan dengan baik, ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi kehadiran wali murid pada saat rapat koordinasi dengan pihak madrasah selalu ikut berperan serta, selain itu masyarakat sekitar juga ikut berperan serta baik dalam pembangunan fisik, maupun penciptaan lingkungan yang kondusif, dan perlu diketahui bahwa berdirinya madrasah ini juga inisiatif masyarakat.

Ketiga, dalam hal kepemimpinan yang demokratis dan profesional, kepemimpinan di madrasah ini juga sesuai dengan konsep manajemen pendidikan, dimana kepala madrasah dalam mengambil kebijakan apapun selalu melibatkan semua warga sekolah termasuk komite madrasah, tokoh masyarakat sekitar madrasah, wali murid sehingga semua kebijakan yang ada, mampu terlaksana dengan baik. *Keempat*,

³⁰Sri Astina Abubakar. Guru Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntuli, *Wawancara*, Buntulia: Senin,15 Juli 2019

³¹Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin,24 Juni 2019

³²Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin,24 Juni 2019

dalam hal *teamwork* yang kompak dan transparan, kegiatan madrasah juga terlaksana dengan baik, hal ini terlihat disetiap awal bulan secara terstruktur, dilakukan rapat koordinasi selain itu rapat koordinasi juga dilaksanakan secara insidental diluar rapat bulanan.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip efisiensi Manajemen Berbasis Madrasah di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia sudah cukup baik. Semua ini tidak lepas dari kemampuan kepala Madrasah, dalam mengarahkan dan memberikan motivasi semua personil yang ada dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dengan beberapa pola manajemen berbasis sekolah di atas, madrasah mampu melakukan berbagai layanan pendidikan dengan baik, ini dapat dilihat dari beberapa indikator, *Pertama* layanan belajar peserta didik. *Kedua*, sarana dan prasarana sekolah/madrasah. *Ketiga*, program humas. *Keempat*, partisipasi masyarakat dan budaya sekolah. Hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa, manajemen berbasis madrasah di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntuliamampu mewujudkan madrasah yang efektif dan efisien.

Prinsip efisiensi dalam implementasi manajemen berbasis madrasah dalam peningkatan akreditasi Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia. Hal ini dapat dilihat dari Indikator prinsip efisiensi manajemen berbasis madrasah, dapat terlaksana dengan baik, yakni *Pertama*, layanan belajar peserta didik. *Kedua*, sarana dan prasarana madrasah menunjang kegiatan pembelajaran maupun pengembangan bakat dan minat para peserta didik, meskipun belum sepenuhnya memadai. *Ketiga*, program humas dengan melibatkan semua komponen madrasah. *Empat*, partisipasi masyarakat dan budaya sekolah. Dari indikator prinsip efisiensi Manajemen Berbasis Madrasah di atas, jelas sangat menunjang peningkatan akreditasi Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia.

g. Prinsip Akuntabilitas

Pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas seperti berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, juga harus memperhatikan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia membuat anggaran sesuai dengan visi dan misinya, dengan memperhatikan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Sebagaimana dikemukakan oleh bendahara yayasan, bahwa mengenai kesesuaian visi dan misi serta skala prioritas penggunaan anggaran, dengan skala prioritas biasanya ditentukan dirapat pengurus tentang hal-hal yang mendesak dan yang tidak mendesak, kesemua hal tersebut diputuskan melalui musyawarah di tingkat pengurus yayasan.³³

Salah satu wujud dari penerapan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan dibuatnya laporan keuangan madrasah. Madrasah wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan madrasah selama 1 tahun yang lalu, serta hasil yang telah dicapai dan laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Berdasarkan hasil dokumentasi menemukan bahwa yayasan hanya membuat catatan sederhana, yang hanya berupa pencatatan

³³Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 24 Juni 2019.

penerimaan serta pengeluaran yang dilaporkan setahun sekali, yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan penuturan kepala madrasah bahwa, pertanggung jawaban dilaporkan setahun sekali, sama seperti RAPBS/RKAM ketika membuat laporan. Pengelolaan dan pencatatan keuangan madrasah masih sangat sederhana. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya tenaga kerja dan penerimaan pemasukan yang terbilang tidak rutin.³⁴

Kepala madrasah juga berkewajiban menyampaikan hasil setiap keputusan atau kebijakan bagi pihak internal maupun pihak eksternal madrasah.³⁵ Pengelolaan anggaran madrasah perlu menentukan skala prioritas program dalam penggunaan anggaran. Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia membuat proporsi anggaran dipandang telah sesuai dengan visi dan misi dari masing-masing unit pendidikan. Selanjutnya akuntabilitas keuangan mengharuskan madrasah, untuk membuat laporan keuangan menggambarkan kinerja finansial madrasah kepada pihak luar. Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia juga membuat sebuah laporan keuangan, yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan. Laporan tersebut dibuat setiap bulannya, dan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama tentang Pemutakhiran data inventaris kekayaan negara di lingkungan Kementerian Agama, setiap satuan kerja wajib menyampaikan laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi instansi (SAI) setiap bulannya.³⁶

Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia dalam pengawasan pengelolaan keuangan melibatkan pihak internal dan juga pihak eksternal. Pihak internal madrasah yang melakukan pengawasan yaitu yayasan dan kepala madrasah untuk melakukan pemeriksaan. Pihak eksternal yang terlibat dalam pengawasan madrasah adalah Kementerian Agama (Kemenag) yang khusus mengawasi pengelolaan dana BOS untuk madrasah dan komite. Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia dalam pengelolaan keuangannya belum ada pengaduan yang signifikan terjadi terkait pengelolaan keuangan madrasah karena selalu melakukan pengawasan dengan pihak terkait.³⁷

Konfirmasi dilakukan terkait penyimpangan atau ketidak sesuaian dalam pelaporan dana BOS, maka dilakukan pula wawancara dengan Komite Madrasah selaku pihak eksternal dalam melakukan pengawasan terkait pengelolaan dana BOS. Beliau mengatakan bahwa: Pengawasan yang dilakukan oleh komite madrasah masih kurang karena komite madrasah hanya sebatas mengetahui dan menyetujui saja. Hal ini kurang sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, komite madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.³⁸

Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia sudah menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Namun, dalam penyusunan laporan keuangan masih belum

³⁴Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 24 Juni 2019

³⁵Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 24 Juni 2019

³⁶Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 24 Juni 2019

³⁷Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 24 Juni 2019

³⁸Hamid Buheli. Komite Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 8 Juli 2019

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Sedangkan Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Penerapan Akuntabilitas dilihat dari adanya pendokumentasian setiap kebijakan dalam proses penganggaran yang tersedia bagi pemangku kepentingan, membuat anggaran sudah sesuai dengan visi misi, akuntabel dalam pengelolaan anggaran yang dikeluarkan dengan menentukan skala prioritas, sudah membuat laporan keuangan setiap bulannya yang dipublikasikan pada saat rapat ataupun melalui papan pengumuman, dan melakukan pengawasan rutin. Namun pengawasan yang dilakukan dipandang oleh komite madrasah masih belum maksimal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas Manajemen Berbasis Madrasah dalam peningkatan akreditasi madrasah di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia sudah cukup baik, dimana sudah memenuhi beberapa indikator transparansi dalam pengelolaan keuangannya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah, adanya pendokumentasian disetiap kebijakan dalam proses penganggaran yang tersedia, pembuatan anggaran sudah sesuai dengan visi misi, menentukan skala prioritas, dan telah membuat laporan keuangan setiap bulannya yang dipublikasikan pada saat rapat, ataupun melalui papan pengumuman dan melakukan pengawasan rutin. Berdasarkan hasil temuan di atas, dapat disimpulkan secara keseluruhan penerapan manajemen berbasis madrasah, dalam menunjang akreditasi di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Kabupaten Pohuwato sudah terealisasi cukup baik, dalam hal menerapkan prinsip kemandirian, keadilan, kemitraan, keterbukaan, partisipasi, efisiensi dan prinsip akuntabilitas.

Simpulan

Berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil temuan penelitian yang telah dilakukan di atas, ditemukan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, Implementasi manajemen berbasis madrasah dalam peningkatan akreditasi di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia sudah terealisasi cukup baik dalam hal menerapkan prinsip kemandirian, keadilan, kemitraan, keterbukaan, partisipasi, efisiensi dan prinsip akuntabilitas. Dalam hal akreditasi Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia telah diimplementasikan pada delapan standar nasional pendidikan, yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan serta standar penilaian. Penerapan kedelapan standar nasional pendidikan yang menjadi dasar penilaian akreditasi Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, dipandang telah dijalankan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan nilai akreditasi B. *Kedua*, faktor pendukung penerapan manajemen berbasis madrasah dalam peningkatan akreditasi madrasah di Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, diantaranya ialah adanya kekompakan dari semua elemen yang ada di madrasah, semangat yang tinggi dalam membangun madrasah, adanya minat dan kerjasama yang tinggi, serta adanya kesadaran personil dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Sementara yang menjadi faktor penghambat diantaranya ialah rendahnya minat orang tua dan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah, layanan ketata usaha yang belum representatif, kebijakan pemerintah dan yayasan, adanya program pendidikan gratis, masih minimnya sarana prasarana, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang keunggulan madrasah.

Referensi

- Depag RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1996.
- Djati Sidi Indra, *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011.
- Fathan Lasiki. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Bidang Kesiswaan, *Wawancara*, Buntulia: Rabu, 10 Juli 2019.
- Hamid Buheli. Komite Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 8 Juli 2019.
- Hasil Pengamatan, *Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato*. Observasi awal: Selasa, 23 Oktober 2018.
- Irawati As. Ali. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Bidang Kurikulum, *Wawancara*, Buntulia: Selasa, 2 Juli 2019.
- Irianto, Yoyon Bahtiar, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mulyasa, E, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 24 Juni 2019.
- Nurul Khairayah Hulawa. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 24 Juni 2019.
- Rohiat. *Manajemen Sekolah Teori Dasar Dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Sri Astina Abubakar. Guru Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntuli, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 15 Juli 2019.
- Sufiati. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Buntulia Bidang Sarana dan Prasarana, *Wawancara*, Buntulia: Selasa, 2 Juli 2019.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung, Alfabeta, Cet. 11. 2011.
- Sunanto, "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan", *Jurnal Intelektualita* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2015.
- Umiarso dan Gojali Imam. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2010.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yolha Gam. Tata Usaha Madrasah, *Wawancara*, Buntulia: Senin, 8 Juli 2019.
-